**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

 Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

 Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Sosial Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, *dan* Evalusi Pembangunan Daerah, Instansi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**1.1.1.Pengertian Renja**

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Dinas Sosial menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

 **1.1.2.Proses Penyusunan Renja**

 Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

**1.1.2.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

 Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

****

Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
24. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesi No.86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
25. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesi No.86 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**1.3. Maksud dan Tujuan**

 Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan Dinas Sosial yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Sosial ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Sosial secara umum. Dinas Sosial untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

 Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017**

 Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2020;

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

 Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

 Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang : uraian penutup.

**Lampiran**

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2018**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Sosial** **Kabupaten Lumajang**

 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran

 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 3. Program penyelenggaraan Dinas Sosial

 4. Program Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Umum

 5. Program peningkatan administrasi Dinas Sosial

**c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan**

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

d. Faktor Penyebab Keberhasilan atau Ketidakberhasilan

 1. Keterbatasan jumlah UPT Sosial

 2. Keberadaan Shelter Sosial yang belum memfasilitasi seluruh jenis PMKS

 3. Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap korban bencana alam

 4. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarkat miskin dan organisasi sosial

e. Implikasi dan Kebijakan yang diambil selanjutnya

 1. Meningkatkan penanganan PMKS

 2. Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS

**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**

**Dinas Sosial Kabupaten Lumajang**

**Dinas Sosial Kabupaten Lumajang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/****Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program *(outcome)/* Kegiatan *(output)*** | **Target Kinerja Capaian Program (rensta perangkat Daerah 2020)** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020** | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018** | **Target program dan kegiatan renja perangkat daerah 2019** | **Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan** |
| **Target renja perangkat daerah 2018** | **Realisasi renja perangkat daerah 2018** | **Tingkat realisasi (%)** | **realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2019** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
|  |  |  |  |  |  |  | **100** |  |  |  |
|  | **2** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.1.06.01.01 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran** | 100% | **1.012.047.700** | 681.019.900,00 | 585.014.131,00 | 85,90 | 100% | **848.146.988** |  |
| **1.06.1.06.01.01.02** | 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan | 6  | **1.012.047.700** | 681.019.900,00 | 585.014.131,00 | 85,90 | 6 | **848.146.988** |  |
| **1.06.1.06.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | 100% | **1.633.664.600** |  |  |  | 100% | **795.556.000** |  |
| **01.01.02. 045** | 1. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |  Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan | 3  | 1.412.024.600 | 209.170.000,00 | 197.723.000,00 | 94,53 | 3 | 627.916.000 |  |
| 01.01.02. 046 | 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara | 7 | 221.640.000 | 180.500.000,00 | 157.200.343,00 | 87,09 | 7 | 167.640.000 |  |
| **1.06.1.06.01.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**  | **Prosentase pemenuhan pelaporan dan capaian kinerja** | 100% | **42.562.000** |  |  |  | 100% | **4.610.000** |  |
| **01.01.06,001** | 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP |  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun | 10 dokumen | 1.180.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 | 10 dokumen | 1.200.000 |  |
| 1.06.1.06.01.06.002 | 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran |  jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 5 dokumen | 480.000 | 470.000,00 | 470.000,00 | 100 | 5 dokumen | 480.000 |  |
| **1.06.1.06.01.06.003** | 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | 4 dokumen | 4.350.000 | 2.060.000,00 | 2.058.000,00 | 99,90 | 4 dokumen | 2.930.000 |  |
| **1.06.1.06.01.06.007** | 4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | 10 dokumen | 36.552.000 |  |  |  | - | - |  |
| **1.06.1.06.01.26** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Prosentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial** | 90,9% | 1.131.584.750 |  |  |  | 80% | 1.239.289.000 |  |
| **1.06.1.06.01.26** | 1.Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca bencana | 80 orang | 212.790.000 |  |  |  | 60 orang, | 84.826.000 |  |
|  |   | jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan bencana | 100 orang  |   | 51.000.000,00 | 44.765.000,00 | 87,77 | 100 orang |   |  |
|  |   | Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana | 30 tagana dan 45 relawan |   |  |  |  | 30 tagana dan 45 relawan |   |  |
| **1.06.1.06.01.26.002** | 2.Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar | Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian  | 7000 ahli waris  | 141.730.000 | 44.361.000,00 | 32.726.000,00 | 73,77 | 4000 ahli waris | 68.818.000 |  |
|  |   | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi keserasian sosial dan kearifan lokal | 200 |   |  |  |  | 268 |   |  |
|  |   | Jumlah aparat yg mendapatkan sosialisasi penanganan orang terlantar | 70 |   |  |  |  | - |   |  |
|  |   | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi desa berketahanan sosial | 100 |   |  |  |  | - |   |  |
|  |   | Jumlah orang terlantar yg mendapatkan pelayanan | 40 |   |  |  |  | 40 |   |  |
| **1.06.1.06.01.26.003** | 3.Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial | Jumlah Pendamping PKH yang melakukan pendampingan KPM. | 147 orang | 777.064.750 |  |  |  | 140 orang | 1.085.645.000 |  |
|  |   | Jumlah pengurus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terfasilitasi |  46256 orang |   | 976.192.500,00 | 608.594.700,00 | 62,34 | 46256 orang |   |  |
| **1.06.1.06.01.28** | **PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL** | **Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | **90,9%** | **995.170.250** |  |  |  | **80%** | **999.597.500** |  |
| **1.06.1.06.01.28.001** | 1.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia | Jumlah Anak dengan kasus sosial Tertangani | 3591 anak | 547.884.750 |  |  |  | 3552 anak | 530.162.000 |  |
|  |   | Jumlah Lansia dengan kasus sosial Tertangani | 50 orang lansia |   |  |  |  | 40 orang lansia |   |  |
| **1.06.1.06.01.28.002** | 2.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial | Jumlah PMKS yang tersosialisasi penanganan PMKS | 410 orang | 190.810.500 |  |  |  | 377 orang | 141.836.500 |  |
|  |  | Jumlah Tuna Sosial yang ditangani | 50 orang |   |  |  |  | 30 orang |   |  |
| **1.06.1.06.01.28.003** | 3.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani | 38 orang  | 256.475.000 | 228.127.500,- | 226.196.500,- | 99,15 | 88 orang | 327.599.000 |  |
| **1.06.1.06.01.27** | **PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Prosentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial**  | 90% | 1.867.604.700 |  |  |  | 80% | 1.441.514.000 |  |
| **1.06.1.06.01.27.001** | 1.Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Jumlah Keluarga Miskin Yang mendapat bantuan  | 1680 keluarga | 981.942.200 |  |  |  | 1680 keluarga | 676.268.000 |  |
|  |   | Jumlah KUBE yg mendapatkan bimbingan dan pemantapan  | 40 KUBE |   |  |  |  | 39 KUBE |   |  |
|  |   | Jumlah peserta yg mendapat sosialisasi dan koordinasi bantuan sosial pangan | 399 |   |  |  |  | 604 |   |  |
|  |   | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi bea siswa berprestasi gakin | 68 orang |   |  |  |  | 204 orang |   |  |
|  |   | Jumlah rumah tangga yg diverval BDT | 175.000 |   |  |  |  | - |   |  |
|  |   | Jumlah KUBE Berprestasi | 10 |   |  |  |  | - |   |  |
|  | 2.Pemberdayaan Kelembagaan Sosial | Jumlah pengurus Karang Taruna, yang dibina |  226 org,  | 641.053.000 |  |  |  | 205 org, | 523.158.000 |  |
|  |   | Jumlah pengurus LKS anak dan psikotik yg dibina |  60 org, |   |  |  |  | 60 org, |   |  |
|  |   | Jumlah pengurus Karang Werdha yang dibina |  60 org,  |   |  |  |  | 50 org, |   |  |
|  |   | Jumlah PSM (Pekerja sosial Masyarakat)yang dibina | 205 orang |   |  |  |  | 205 orang |   |  |
|  |   | jumlah TKSK yang diberdayakan  | 21 orang |   |  |  |  | 21 orang |   |  |
|  |   | Jumlah dunia usaha yg diberdayakan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial | - |   |  |  |  | 65 orang |   |  |
|  |   | Jumlah pelaku PUB (pengumpulan uang dan barang) dan UGB (undian gratis berhadiah) | 80 orang |   |  |  |  | 65 orang |   |  |
|  |   | Jumlah pengurus K3 S (Koordinator kegiatan kesejahteraan sosial) Kabupaten yg terfasilitasi | 62 |   |  |  |  | 60 |   |  |
|  |   | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi WKSBM (Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat) | 126 |   |  |  |  | 65 |   |  |
|  |   | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi LK3 (Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga) | 105 |   |  |  |  | - |   |  |
|  |   | Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yg dibina dalam melaksanakan jejaring sosial | - |   |  |  |  | 100 |   |  |
| **1.06.1.06.01.27.003** | 3.Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Jumlah TMP yang dipelihara  | 1 TMP  | 244.609.500 | 75.000.000,- | 72.856.439,- | 97,14 | 1 TMP | 242.088.000 |  |
|  |   | Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dipelihara (TPU) | 1 TPU |   | 40.000.000,- | 39.892.500,- | 99,73 | 1 TPU |   |  |
|  |   | jumlah orang yg mengikuti event bertema kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial yang difasilitasi  |  135 orang |   |  |  |  | 135 orang |   |  |

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosialdilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas SosialKabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas SosialKabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut :

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Sosial**

**Kabupaten Lumajang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR** | **IKK** | **SPM/Standar****Nasional** | **TARGET** | **Realisasi Capaian** | **Proyeksi**  | **Catatan analisis** |
| **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** | **Tahun 2015** | **Tahun 2016** |
|  | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran** |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 9.600.000 | 14.450.000 |  |
|  | Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 242.774.700 |  |  |  |  |
|  |  Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Prosentase pemenuhan pelaporan dan capaian kinerja |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun |  |  | 10 dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | 1.646.000 |  |  |  |  |
|  |  jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun |  |  | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 670.000 |  |  | 649.900.000 |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun |  |  | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 1.616.000 |  |  | 779.900 |  |
|  | Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD |  |  | - | 10 dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen |  |  |  |  |  |
|  | Prosentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial |  |  | 80% | 90,9% | 91% | 92% |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca bencana |  |  | 60 orang,  | 80 orang | 80 orang. | 80 orang  |  |  |  |  |  |
|  | jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan bencana |  |  | 100 orang  | 100 orang  | 100 orang  | 100 orang  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana |  |  | 30 tagana dan 45 relawan | 30 tagana dan 45 relawan | 30 tagana dan 45 relawan | 30 tagana dan 45 relawan |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian  |  |  | 4000 ahli waris  | 7000 ahli waris  | 7100 ahli waris  | 7200 ahli waris  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi keserasian sosial dan kearifan lokal |  |  | 268 | 200 | 205 | 210 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah aparat yg mendapatkan sosialisasi penanganan orang terlantar |  |  | - | 70 | 71 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi desa berketahanan sosial |  |  | - | 100 | 101 | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah orang terlantar yg mendapatkan pelayanan |  |  | 40 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Pendamping PKH yang melakukan pendampingan KPM. |  |  | 140 orang | 147 orang | 147 orang | 147 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pengurus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terfasilitasi |  |  | 46256 orang |  46256 orang |  46256 orang |  46256 orang |  |  |  |  |  |
|  | **Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** |  |  | **80%** | **90,9%** | **91%** | **92%** |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Anak dengan kasus sosial Tertangani |  |  | 3552 anak | 3591 anak | 3596 anak | 3601 anak |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Lansia dengan kasus sosial Tertangani |  |  | 40 orang lansia | 50 orang lansia | 55 orang lansia | 60 orang lansia |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah PMKS yang tersosialisasi penanganan PMKS |  |  | 377 orang | 410 orang | 410 orang | 410 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Tuna Sosial yang ditangani |  |  | 30 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani |  |  | 88 orang  | 38 orang  | 48 orang  | 58 orang  |  |  |  |  |  |
|  | Prosentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial  |  |  | 80% | 90% | 90,9% | 91% |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Keluarga Miskin Yang mendapat bantuan  |  |  | 1680 keluarga  | 1680 keluarga | 2100 keluarga | 2100 keluarga  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah KUBE yg mendapatkan bimbingan dan pemantapan  |  |  | 39 KUBE | 40 KUBE | 41 KUBE | 42 KUBE |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah peserta yg mendapat sosialisasi dan koordinasi bantuan sosial pangan |  |  | 604  | 399 | 399 | 399 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi bea siswa berprestasi gakin |  |  | 204 orang | 68 orang | 68 orang | 68 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah rumah tangga yg diverval BDT |  |  | - | 175.000 | 225.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah KUBE Berprestasi |  |  | - | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pengurus Karang Taruna, yang dibina |  |  |  205 org,  |  226 org,  |  : 226 org,  |  226 org,  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pengurus LKS anak dan psikotik yg dibina |  |  |  60 org, |  60 org, |  60 org, |  60 org, |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pengurus Karang Werdha yang dibina |  |  |  50 org,  |  60 org,  |  70 org,  |  80 org,  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah PSM (Pekerja sosial Masyarakat)yang dibina |  |  | 205 orang | 205 orang | 205 orang | 205 orang |  |  |  |  |  |
|  | jumlah TKSK yang diberdayakan  |  |  | 21 orang | 21 orang | 21 orang | 21 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah dunia usaha yg diberdayakan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial |  |  | 65 orang | - | 80 orang | 85 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pelaku PUB (pengumpulan uang dan barang) dan UGB (undian gratis berhadiah) |  |  | 65 orang | 80 orang | 85 orang | 90 orang |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pengurus K3 S (Koordinator kegiatan kesejahteraan sosial) Kabupaten yg terfasilitasi |  |  | 60 | 62 | 63 | 64 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi WKSBM (Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat) |  |  | 65 | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi LK3 (Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga) |  |  | - | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yg dibina dalam melaksanakan jejaring sosial |  |  | 100 | - | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah TMP yang dipelihara  |  |  | 1 TMP  | 1 TMP  | 1 TMP  | 1 TMP  | 118.000.000 |  |  |  |  |
|  | Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dipelihara (TPU) |  |  | 1 TPU | 1 TPU | 1 TPU | 1 TPU |  |  |  |  |  |
|  | jumlah orang yg mengikuti event bertema kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial yang difasilitasi  |  |  |  135 orang |  135 orang |  135 orang |  135 orang |  |  |  |  |  |

 Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

 Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

**Tabel 2.1**

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Jenis Data** | **Formulasi/Rumus Perhitungan** | **Teknik Pengumpulan Data** | **Teknik Monitoring dan Evaluasi** |
| 1 | Persentase Peningkatan Penanganan PMKS | Kuantitatif | $$\frac{\sum\_{}^{}PMKS yg ditangani}{\sum\_{}^{}PMKS seluruhnya}×100\%$$Penjelasan : yang dimaksud dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS Terdiri dari 26 item antara lain Fikir Miskin, anak jalanan,Tuna Susila gelandangan pengemis , anak terlantar,anak dengan kedisabilitasan,korban bencana alam,korban bencana sosial,korban Napza dll . Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. | Penghitungan hasil Survey Lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial  | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala |
| 2 | Persentase % Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS | Kuantitatif | $$\frac{\sum\_{}^{}PSKS yg mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah }{\sum\_{}^{}PSKS yg seharusnya mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah}×100\%$$Penjelasan :Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas 15 Kategori , antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, TKSK, Karang Taruna,LKS(Lembaga Kesejahteraan Sosial) dll. | Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi secara berkala |

**Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Sosial berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunties*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Dinas Sosial dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Sosial didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1 | Masih tingginya masalah kemiskinan  | 1. Penanganan PMKS belum optimal | * + - 1. Keterbatasan jumlah UPT Sosial
			2. Shelter sosial belum memfasilitasi seluruh jenis PMKS
			3. Upaya perlindungan sistem terhadap korban bencana alam belum optimal
 |
|   |
|   | 2. Pemberdayaan PSKS belum optimal | 1. 'Upaya pemberdayaan masy.miskin belum optimal |
|   | 2. Upaya pemberdayaan organisasi sosial di masy. Belum optimal |

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

**Tabel T-C.31**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**

**Dinas Sosial**

**Kabupaten Lumajang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rancangan Awal RKPD** | **Hasil Analisis Kebutuhan** | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |  |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dinas Sosial | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran** | 100% | **848.146.988** | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dinas Sosial | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran** | 100% | **1.012.047.700** |  |
|  | Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran |  | Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan | 6  | **848.146.988** | Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran |  | Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan | 6  | **1.012.047.700** |  |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Sosial | Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | 100% | **795.556.000** | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Sosial | Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | 100% | **1.633.664.600** |  |
|  | Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan | 3  | 627.916.000 | Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan | 3  | 1.412.024.600 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur |  | Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara | 7 | 167.640.000 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur |  | Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara | 7 | 221.640.000 |  |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Dinas Sosial | Prosentase pemenuhan pelaporan dan capaian kinerja | 100% | **4.610.000** | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Dinas Sosial | Prosentase pemenuhan pelaporan dan capaian kinerja | 100% | **42.562.000** |  |
|  | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP |  |  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun | 10 dokumen | 1.200.000 | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP |  |  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun | 10 dokumen | 1.180.000 |  |
|  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran |  |  jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 5 dokumen | 480.000 | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran |  |  jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 5 dokumen | 480.000 |  |
|  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | 4 dokumen | 2.930.000 | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | 4 dokumen | 4.350.000 |  |
|  | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD |  | Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | - | - | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD |  | Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | 10 dokumen | 36.552.000 |  |
| 4. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Dinas Sosial | Prosentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80% | 1.239.289.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Dinas Sosial | Prosentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 90,9% | 1.131.584.750 |  |
|  | 1.Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam |  | Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca bencana | 60 orang,  | 84.826.000 | 1.Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam |  | Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca bencana | 80 orang | 212.790.000 |  |
|  |   |  | jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan bencana | 100 orang  |   |   |  | jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan bencana | 100 orang  |   |  |
| 5. |   | Dinas Sosial | Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana | 30 tagana dan 45 relawan |   |   | Dinas Sosial | Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana | 30 tagana dan 45 relawan |   |  |
|  | 2.Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar |  | Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian  | 4000 ahli waris  | 68.818.000 | 2.Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar |  | Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian  | 7000 ahli waris  | 141.730.000 |  |
|  |   |  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi keserasian sosial dan kearifan lokal | 268 |   |   |  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi keserasian sosial dan kearifan lokal | 200 |   |  |
|  |   |  | Jumlah aparat yg mendapatkan sosialisasi penanganan orang terlantar | - |    |   |  | Jumlah aparat yg mendapatkan sosialisasi penanganan orang terlantar | 70 |   |  |
|  |   |  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi desa berketahanan sosial | - |   |  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi desa berketahanan sosial | 100 |   |  |
|  |   |  | Jumlah orang terlantar yg mendapatkan pelayanan | 40 |   |   |  | Jumlah orang terlantar yg mendapatkan pelayanan | 40 |   |  |
|  | 3.Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial |  | Jumlah Pendamping PKH yang melakukan pendampingan KPM. | 140 orang | 1.085.645.000 | 3.Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial |  | Jumlah Pendamping PKH yang melakukan pendampingan KPM. | 147 orang | 777.064.750 |  |
| 8. |   |  | Jumlah pengurus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terfasilitasi | 46256 orang |   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | Jumlah pengurus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terfasilitasi |  46256 orang |   |  |
| 5. | **PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL** |  | **Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | **80%** | **999.597.500** | Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran |  | **Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | **90,9%** | **995.170.250** |  |
|  | 1.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia |  | Jumlah Anak dengan kasus sosial Tertangani | 3552 anak | 530.162.000 |  |  | Jumlah Anak dengan kasus sosial Tertangani | 3591 anak | 547.884.750 |  |

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musyawarah. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

**Tabel T-C.32**

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020**

**KABUPATEN LUMAJANG**

**Dinas Sosial**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Dinas Sosial | jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan | 6 jenis |  |
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Sosial |  Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan | 3 Jenis |  |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Sosial | Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara | 7 jenis |  |
|  | Program Peningkatan Pe ngembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP | Dinas Sosial |  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun | 10 dokumen |  |
|  |  | Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran  | Dinas Sosial |  jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 5 dokumen |  |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dinas Sosial | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | 4 dokumen |  |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | Dinas Sosial | Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | - |  |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | Dinas Sosial | Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca bencana |  |  |
|  |  |   |  | jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan bencana | 100 orang |  |
|  |  |   |  | Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana | 30 tagana dan 45 relawan |  |
|  |  | 2.Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar | Dinas Sosial | Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian  | 4000 ahli waris  |  |
|  |  |   |  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi keserasian sosial dan kearifan lokal | 268 |  |
|  |  |   |  | Jumlah aparat yg mendapatkan sosialisasi penanganan orang terlantar | - |  |
|  |  |   |  | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi desa berketahanan sosial | - |  |
|  |  |   |  | Jumlah orang terlantar yg mendapatkan pelayanan | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  3.Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Pendamping PKH yang melakukan pendampingan KPM. | 140 orang |  |
|  |  |  |  | Jumlah pengurus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terfasilitasi | 46256 orang |  |
|  | 4.PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL | 1.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia | Dinas Sosial | Jumlah Anak dengan kasus sosial Tertangani | 3552 anak |  |
|  |  |   |  | Jumlah Lansia dengan kasus sosial Tertangani | 40 orang lansia |  |
|  |  | 2.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial | Dinas Sosial | Jumlah PMKS yang tersosialisasi penanganan PMKS | 377 orang |  |
|  |  |  |  | Jumlah Tuna Sosial yang ditangani | 30 orang |  |
|  |  | 3.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Dinas Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani | 88 orang  |  |
|  | PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Dinas Sosial | Jumlah Keluarga Miskin Yang mendapat bantuan  | 1680 keluarga  |  |
|  |  |   |  | Jumlah KUBE yg mendapatkan bimbingan dan pemantapan  | 39 KUBE |  |
|  |  |   |  | Jumlah peserta yg mendapat sosialisasi dan koordinasi bantuan sosial pangan | 604  |  |
|  |  |   |  | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi bea siswa berprestasi gakin | 204 orang |  |
|  |  |   |  | Jumlah rumah tangga yg diverval BDT | - |  |
|  |  |   |  | Jumlah KUBE Berprestasi | - |  |
|  |  | 2.Pemberdayaan Kelembagaan Sosial | Dinas Sosial | Jumlah pengurus Karang Taruna, yang dibina |  205 org,  |  |
|  |  |   |  | Jumlah pengurus LKS anak dan psikotik yg dibina |  60 org, |  |
|  |  |   |  | Jumlah pengurus Karang Werdha yang dibina |  50 org,  |  |
|  |  |   |  | Jumlah PSM (Pekerja sosial Masyarakat)yang dibina | 205 orang |  |
|  |  |   |  | jumlah TKSK yang diberdayakan  | 21 orang |  |
|  |  |   |  | Jumlah dunia usaha yg diberdayakan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial | 65 orang |  |
|  |  |   |  | Jumlah pelaku PUB (pengumpulan uang dan barang) dan UGB (undian gratis berhadiah) | 65 orang |  |
|  |  |   |  | Jumlah pengurus K3 S (Koordinator kegiatan kesejahteraan sosial) Kabupaten yg terfasilitasi | 60 |  |
|  |  |   |  | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi WKSBM (Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat) | 65 |  |
|  |  |   |  | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi LK3 (Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga) | - |  |
|  |  |   |  | Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yg dibina dalam melaksanakan jejaring sosial | 100 |  |
|  |  | 3.Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Dinas Sosial | Jumlah TMP yang dipelihara  | 1 TMP  |  |
|  |  |   |  | Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dipelihara (TPU) | 1 TPU |  |
|  |  |   |  | jumlah orang yg mengikuti event bertema kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial yang difasilitasi  |  135 orang |  |

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

* 1. Dapat dibayangkan (*imaginabl*e) oleh pimpinan dan staf;
	2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
	3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);.
	4. Terfokus pada permasalahan utama;
	5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
	6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

“***TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG***

***YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT****”*

**Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | MISI | PENJELASAN MISI |
| 1 | Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata; | Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersam-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata |
| 2 | Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri  | Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social) |
| 3 | Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance);* | Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance)* yang didukung dengan teknologi informasi |

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance)*.

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

* + 1. **Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Sosial secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Sosial untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat.

* + 1. **Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS
2. Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial
3. Persentase peningkatan penanganan PMKS
4. Persentase peningkatan jumlah dan peran PSKS
	* 1. **Strategi dan kebijakan**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

* 1. Meningkatkan Penanganan PMKS;
	2. Mengoptimalkan Pemberdayaan PSKS;

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Dinas Sosial adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan UPT Sosial yang ada
2. Mengoptimalkan shalter yang ada
3. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan PKH
4. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam
5. Mengoptimalkan upaya pemebrdayaan organisasi sosial di masyarakat

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindaklanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

* + 1. **Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Seiring dengan misi yang ditetapkan Dinas Sosial, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
3. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
4. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
5. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
6. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
7. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
	* 1. **Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
3. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
4. Program penanganan dan pemberdayaan sosial

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **FORMULA** | **Target Kinerja 2020** |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial | 1.Meningkatnya Kesejahteraan PMKS2. Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Persentase peningkatan penanganan PMKS | $$\frac{\sum\_{}^{}PMKS yg ditangani}{\sum\_{}^{}PMKS seluruhnya}×100\%$$ | 29,42 % |
| Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS  | $$\frac{\sum\_{}^{}PSKS yg mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah }{\sum\_{}^{}PSKS yg seharusnya mendapatkan fasilitasi atau bantuan dari pemerintah}×100\%$$ | 82 % |
|  |  |  |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran;

a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi anggaran yang disusun.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

1. Program Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

b. Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar.

c. Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial

 5. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

b. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

c. . Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

 6 . Program Penangan dan Pemberdayaan Sosial

 a. Penangan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

 c. Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

**Kabupaten Lumajang**

**Kecamatan Klakah**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Program/Kegiatan | Indiktor Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 |
|  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran** | Dinas Sosial | 100% | **1.012.047.700** | DAU |  | 100% | **1.113.252.470** |
|  | Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Jumlah jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang disediakan |  | 6  | **1.012.047.700** |  |  | 6  | **1.113.252.470** |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | Dinas Sosial | 100% | **1.633.664.600** | DAU |  | 100% | **1.797.031.060** |
|  | Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |  Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan |  | 3  | 1.412.024.600 |  |  | 3  | 1.553.227.060 |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara |  | 7 | 221.640.000 |  |  | 7 | 243.804.000 |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Prosentase pemenuhan pelaporan dan capaian kinerja | Dinas Sosial | 100% | **42.562.000** | DAU |  | 100% | **46.818.200** |
|  | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP |  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang disusun |  | 10 dokumen | 1.180.000 |  |  | 10 dokumen | 1.298.000 |
|  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran |  jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun |  | 5 dokumen | 480.000 |  |  | 5 dokumen | 528.000 |
|  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun |  | 4 dokumen | 4.350.000 |  |  | 4 dokumen | 3.545.300 |
|  | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD | Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD |  | 10 dokumen | 36.552.000 |  |  | 10 dokumen | 33.000.000 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Prosentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial |  | 90,9% | 1.131.584.750 |  |  | 91% | 1.244.743.225 |
| 4 | 1.Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | Jumlah relawan sosial yg dilatih penanganan psikologis pasca bencana | Dinas Sosial | 80 orang | 212.790.000 | DAU |  | 80 orang. | 234.069.000 |
|  |   | jumlah pengurus KSB dalam penanggulangan bencana |  | 100 orang  |   |  |  | 100 orang  |   |
|  |   | Jumlah Tagana terlatih penanganan pasca bencana |  | 30 tagana dan 45 relawan |   |  |  | 30 tagana dan 45 relawan |   |
|  | 2.Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar | Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian  |  | 7000 ahli waris  | 141.730.000 |  |  | 7100 ahli waris  | 155.903.000 |
|  |   | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi keserasian sosial dan kearifan lokal |  | 200 |   |  |  | 205 |   |
|  |   | Jumlah aparat yg mendapatkan sosialisasi penanganan orang terlantar |  | 70 |   |  |  | 71 |   |
|  |   | Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi desa berketahanan sosial |  | 100 |   |  |  | 101 |   |
|  |  3.Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial | Jumlah orang terlantar yg mendapatkan pelayanan |  | 40 |   |  |  | 41 |   |
| Jumlah Pendamping PKH yang melakukan pendampingan KPM. |  | 147 orang | 777.064.750 |  |  | 147 orang | 854.771.225 |
|  |   | Jumlah pengurus KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang terfasilitasi |  |  46256 orang |   |  |  |  46256 orang |   |
|  | **PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL** | **Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | Dinas Sosial | **90,9%** | **995.170.250** |  |  | **91%** | **1.094.687.275** |
|  | 1.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia | Jumlah Anak dengan kasus sosial Tertangani |  | 3591 anak | 547.884.750 |  |  | 3596 anak | 602.673.225 |
|  |   | Jumlah Lansia dengan kasus sosial Tertangani |  | 50 orang lansia |   |  |  | 55 orang lansia |   |
|  | 2.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial | Jumlah PMKS yang tersosialisasi penanganan PMKS |  | 410 orang | 190.810.500 |  |  | 410 orang | 209.891.550 |
|  |  | Jumlah Tuna Sosial yang ditangani |  | 50 orang |   |  |  | 50 orang |   |
|  | 3.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani |  | 38 orang  | 256.475.000 |  |  | 48 orang  | 282.122.500 |
|  | **PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Prosentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial  |  | 90% | 1.867.604.700 |  |  | 90,9% | 2.054.365.170 |
|  | 1.Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Jumlah Keluarga Miskin Yang mendapat bantuan  |  | 1680 keluarga | 981.942.200 |  |  | 2100 keluarga | 1.080.136.420 |
|  |   | Jumlah KUBE yg mendapatkan bimbingan dan pemantapan  |  | 40 KUBE |   |  |  | 41 KUBE |   |
|  |   | Jumlah peserta yg mendapat sosialisasi dan koordinasi bantuan sosial pangan |  | 399 |   |  |  | 399 |   |
|  |   | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi bea siswa berprestasi gakin |  | 68 orang |   |  |  | 68 orang |   |
|  |   | Jumlah rumah tangga yg diverval BDT |  | 175.000 |   |  |  | 225.000 |   |
|  |   | Jumlah KUBE Berprestasi |  | 10 |   |  |  | 20 |   |
|  | 2.Pemberdayaan Kelembagaan Sosial | Jumlah pengurus Karang Taruna, yang dibina |  |  226 org,  | 641.053.000 |  |  |  : 226 org,  | 705.158.300 |
|  |   | Jumlah pengurus LKS anak dan psikotik yg dibina |  |  60 org, |   |  |  |  60 org, |   |
|  |   | Jumlah pengurus Karang Werdha yang dibina |  |  60 org,  |   |  |  |  70 org,  |   |
|  |   | Jumlah PSM (Pekerja sosial Masyarakat)yang dibina |  | 205 orang |   |  |  | 205 orang |   |
|  |   | jumlah TKSK yang diberdayakan  |  | 21 orang |   |  |  | 21 orang |   |
|  |   | Jumlah dunia usaha yg diberdayakan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial |  |  |  |  |  | 80 orang |   |
|  |   | Jumlah pelaku PUB (pengumpulan uang dan barang) dan UGB (undian gratis berhadiah) |  |  |  |  |  | 85 orang |   |
|  |   | Jumlah pengurus K3 S (Koordinator kegiatan kesejahteraan sosial) Kabupaten yg terfasilitasi |  |  |  |  |  | 63 |   |
|  |   | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi WKSBM (Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat) |  |  |  |  |  | 126 |   |
|  |   | Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yg tersosialisasi LK3 (Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga) |  |  |  |  |  | 105 |   |
|  |   | Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yg dibina dalam melaksanakan jejaring sosial |  |  |  |  |  | 100 |   |
|  | 3.Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Jumlah TMP yang dipelihara  |  |  |  |  |  | 1 TMP  | 269.070.450 |
|  |   | Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dipelihara (TPU) |  |  |  |  |  | 1 TPU |   |
|  |   | jumlah orang yg mengikuti event bertema kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial yang difasilitasi  |  |  |  |  |  |  135 orang |   |

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Program Utama**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2020 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

**Program Utama dan Kegiatan**

**Dinas Sosial** **Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Program | Kegiatan |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |
|  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 3 | Program Peningkatan Pe ngembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP |
|  |  | Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran  |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|  |  | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam |
|  |  | 2.Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar |
|  |  |  3.Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial |
| 5 | 4.PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL | 1.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia |
|  |  |   |
|  |  | 2.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial |
|  |  | 3.Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin |
|   |  | 2.Pemberdayaan Kelembagaan Sosial |
|  |  | 3.Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial |

**3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja**

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut

**Sasaran dan Indikator Kinerja**

**Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

| **NO** | **PROGRAM** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET****KINERJA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1) Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran | 100% |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | 2) Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  | Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memada | 100% |
| 3. | Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan |  | Prosentase pemenuhan pelaporan dan capaian kinerja | 100% |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  | Prosentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100% |
| 4 | 4.PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL |  | Prosentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 90,9% |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL |  | Prosentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial | 90% |
|  |  |  |  |  |

**3.3. Alokasi Anggaran**

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar ***9.101.446.060,00*** dengan perincian untuk Belanja Langsung sebesar ***Rp.6.7000.000.000,-*** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar ***Rp.2.401.446.060,00***,- Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

**BAB VII**

**PENUTUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2020.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Dinas Sosial.

 LUMAJANG, September 2019

 Kepala Dinas Sosial



 **Dra. DEWI SUSIYANTI**

 NIP. 19640617 199603 2 002

**PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyususnan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Sosial yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

 Rencana Kerja 2020 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2020 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Sosial ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Lumajang, September 2019

Kepala Dinas Sosial

**Dra. DEWI SUSIYANTI**

NIP. 19640617 199603 2 002

**DAFTAR ISI**

i

**PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

 1.1. Latar Belakang …. 2

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

 1.4. Sistematika Penulisan 5

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7**

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

 SKPD 7

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 14

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 21

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 30**

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 30

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 35

 3.3. Program dan Kegiatan 36

**BAB IV PENUTUP 51**